ABSTRAK

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WARINGIN JAYA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASIDANA DESA (ADD) TAHUN 2013

Oleh

BUDI SETIA AJI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa. BPD sebagai lembaga legislatif desa memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dalam melakukan pembangunan terutama dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tidak dibarengi dengan kemampuan BPD untuk melakukan pengawasan menjadi masalah yang nyata di Indonesia. Yang dimana pengawasan BPD masih menjadi tanda tanya, mengingat minimnya kemampuan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Waringin Jaya terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2013. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan pengawasan BPD dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2013. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Waringin Jaya belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2013. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya peran aktif anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak adanya koordinasi yang baik antara anggota BPD dan Kepala Desa, mulai dari proses penyusunan program pembangunan, proses pembangunan, dan proses pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Kata kunci : Pengawasan, BPD, ADD